

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	58
BAB V PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan

berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);
27. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 78);
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
 30. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD,

serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Urusan Pemerintahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 2 program, 15 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 47.224.000.000,-, dengan fokus utama pada pada Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi tersebut dilaksanakan untuk memfasilitasi tugas DPRD yang meliputi:

1. Penganggaran;
2. Legislasi;
3. Pengawasan.

Dari 2 program, 15 kegiatan, dan 45 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 program, 15 kegiatan, dan 44 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 44.342.840.582,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok

sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 2 program, 15 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 45.337.849.788,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi semua program, kegiatan maupun sub kegiatan kecuali Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Jadwal kegiatan yang padat sehingga mempengaruhi tingkat capaian kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan terutama pada urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, disamping itu jadwal kegiatan kunjungan lapangan

bersamaan dengan jadwal alat kelengkapan lain yang sebagian besar anggotanya dari Komisi I DPRD.

2. Kekurangan SDM karena ASN yang purna tugas dan promosi jabatan tetapi tidak diganti dengan personel yang baru menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih padat.
3. Adanya power politik dalam memfasilitasi DPRD yang menyebabkan tekanan yang tinggi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program Sekretariat DPRD.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi semua Program/Kegiatan/Sub Kegiatan selain 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka apabila terdapat kondisi yang stabil, tidak terjadi perubahan SOTK yang menyebabkan kegiatan kurang optimal, dan koordinasi yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRD. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sedini mungkin setelah anggaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengoptimalan dan pengaturan jadwal kegiatan DPRD secara lebih seksama, sehingga semua kegiatan DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat difasilitasi dengan baik dan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan anggota DPRD, terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga semua program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	88,33%	100 %	85,1 %	85,1 %	100 %	100 %	100 %

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	16 dokumen	100 %	16 dokumen	16 dokumen	100 %	16 dokumen	16 dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan dan Capaian Kinerja yang disusun	4 dokumen	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang	24 dokumen	100 %	26 dokumen	26 dokumen	100 %	26 dokumen	26 dokumen	100 %

		disusun								
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah Pelatihan yang diikuti sesuai tugas dan fungsi	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	8 orang	6 orang	18 orang	18 orang	100 %	19 orang	19 orang	100 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %

	kantor	kantor yang terpenuhi								
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor yang terpenuhi	18 paket	18 paket	18 paket	18 paket	100 %	18 paket	18 paket	100 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang terpenuhi	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL yang dibayarkan honornya	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100 %	14 orang	14 orang	100 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi								
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100 %	22 unit	22 unit	100 %
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin yang dipelihara	7 unit	7 unit	7 paket	7 paket	100 %	79 unit	79 unit	100 %

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan pemeliharaan dan rehab gedung kantor yang dilaksanakan	6 paket	5 paket	6 paket	6 paket	100 %	1 unit	1 unit	100 %
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Hak Administratif dan Keuangan Anggota DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah dokumen pembayaran uang representatif dan tunjangan anggota DPRD yang disusun	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100 %	50 orang	50 orang	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang diadakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	0 paket	0 paket	0 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah dokumen laporan kegiatan pemeriksaan kesehatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	50 orang	50 orang	100 %

		anggota DPRD yang dilaksanakan								
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	68,27%	100 %	98,5%	98,5 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase rancangan perda yang dibahas berdasarkan propemperda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Raperda yang difasilitasi pembahasannya	8 Raperda	5 Raperda	8 Raperda	5 Raperda	62,5 %	10 Raperda	10 Raperda	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah laporan hasil pengkajian perundang-undangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Raperda inisiatif DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Raperda	5 Raperda	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

	dan/atau Naskah Akademik	yang disusun								
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Jumlah laporan pembahasan laporan semester yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Nota Kesepakatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan kunjungan kerja/kunjungan lapangan urusan pemerintahan yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan kunjungan kerja /kunjungan lapangan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum yang disusun	36 Laporan	22 Laporan	14 Laporan	7 Laporan	50 %	15 Laporan	15 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan kunjungan kerja /kunjungan lapangan urusan pemerintahan bidang infrastruktur yang disusun	36 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	28 Laporan	90,3 %	15 Laporan	15 Laporan	100 %

	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan kunjungan kerja /kunjungan lapangan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun	36 Laporan	30 Laporan	31 Laporan	29 Laporan	93,5 %	15 Laporan	15 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan kunjungan kerja /kunjungan lapangan urusan pemerintahan bidang perekonomian yang disusun	36 Laporan	23 Laporan	30 Laporan	24 Laporan	80 %	15 Laporan	15 Laporan	100 %
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase dokumen terkait peningkatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Kapasitas DPRD yang disusun								
	Sub Kegiatan BinteK DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan binteK DPRD yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang dibayarkan honorinya	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100 %	8 orang	8 orang	100 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan kehumasan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	85,7 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Penyerapan dan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun								
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan Reses yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Dokumen laporan Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		DPRD yang difasilitasi								
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah jadwal kegiatan DPRD yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan memfasilitasi undangan-undangan DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 (tiga) Indikator. Dari 3 (tiga) indikator tersebut, 3 (tiga) berstatus tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama tahun 2022.
2. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.
3. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama tahun 2022.
2. Lebih mengoptimalkan evaluasi internal dan pengukuran kinerja agar capaian kinerja dapat terukur secara berkala dan mendukung optimalnya pencapaian kinerja organisasi.
3. Adanya kerjasama antar Kabag, Kasubag dan Pelaksana dalam berkoordinasi dan penyusunan Jadwal pelaksanaan kegiatan.
4. Berpedoman pada jadwal dan rencana kerja serta dokumen RKA Perangkat Daerah.
5. Adanya koordinasi dan Komunikasi antara Sekretaris dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan semua kegiatannya.
6. Melakukan inovasi dan melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka memfasilitasi kegiatan-

kegiatan maupun memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	-	-	78	79	80	81	77,811	79,5	78	79	
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	83	84	85	86	79,55	79,867	80	81	
3.	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	-	-	72 (BB)	73 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	65,31 (B)	66,25 (B)	71,65	72	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
2. Kekurangan SDM karena ASN yang purna tugas dan promosi jabatan tetapi tidak diganti dengan personel yang baru menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih padat.
3. Adanya power politik dalam memfasilitasi DPRD yang menyebabkan tekanan yang tinggi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program Sekretariat DPRD.
4. Jadwal kegiatan yang padat sehingga mempengaruhi tingkat capaian kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Terdapatnya pemahaman yang berbeda terhadap interpretasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi yang optimal antara Sekretariat DPRD dan DPRD.

2. Kompetensi SDM yang ada di Sekretariat DPRD belum dapat mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD (Sebagian besar hanya pada fungsi administrasi).
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
5. Belum tersedianya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dalam rangka mempercepat fasilitasi tugas DPRD, perlu adanya inovasi misalnya jadwal kegiatan DPRD yang terdigitalisasi, survey kepuasan DPRD yang terdigitalisasi, inovasi layanan dan informasi DPRD.
2. Dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat, perlu juga inovasi dalam menyerap aspirasi masyarakat secara cepat dan akurat dan transparan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dalam memfasilitasi semua tugas dan fungsi DPRD.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Inovasi digitalisasi dalam fasilitasi tugas Sekretariat DPRD;
4. Digitalisasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2026 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	9.500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	9.500	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 dokumen	8.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	4 dokumen	8.500	

	Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	4.403.491	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	3.673.910	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	119.020	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	123.600	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti	25 orang	205.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti	10 orang	100.000	

	Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan			
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	30.000	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	30.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18 paket	350.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18 paket	352.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 unit	165.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 unit	165.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					

	Pemerintahan Daerah					Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	175.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	169.200	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	365.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	380.218	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	81.380	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	81.380	

	Dinas Jabatan										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	337.380	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	337.380	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	93.114	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	101.087	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	99.996	
8	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	28.762.370	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	28.509.345	

	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	537.811	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	553.918	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	47.196	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	44.431	
9	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	2.128.357	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	1.252.715	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	3 dokumen	605.664	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	1 dokumen	215.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	5 dokumen	932.001	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2 dokumen	219.000	

10	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran					Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran					
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	667.428	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	351.249	
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	689.317	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	348.429	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	667.337	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	350.382	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	690.954	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	350.382	
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	7.126	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	8.126	
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungja	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 dokumen	999.634	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawab	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	1 dokumen	213.000	

	waban APBD		Pertanggungjawaban APBD			an APBD		Pertanggungjawaban APBD			
11	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	79.850	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Laporan	86.500	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	90.690	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	83.535	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	90.270	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	89.260	
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	97.290	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	15 Laporan	377.907	

	Bidang Perekonomian		Pemerintahan Bidang Perekonomian			Bidang Perekonomian		Pemerintahan Bidang Perekonomian			
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	301.529	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	377.170	
12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD					
	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	449.406	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Orientasi DPRD	1 dokumen	444.806	
	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 dokumen	2.611.443	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 dokumen	744.647	
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 Dokumen	286.264	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 Dokumen	272.014	

	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 orang	34.800	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 orang	34.800	
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	240.200	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	240.200	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 Dokumen	522.794	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	300.773	
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	449.693	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	423.823	
13	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	672.611	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	329.414	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 dokumen	884.424	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 dokumen	984.390	

14	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	646.764	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	605.286	
15	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD					Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	3.217.597	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	2.720.892	
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	152.184	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Dokumen	189.022	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	902.533	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	643.968	

	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	384.050	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	351.277	
					55.292.000					47.052.648	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
2. Program kerja DPRD belum bisa terakomodir dalam RKPD awal Tahun 2024.

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.2. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tidak ada Usulan program dan kegiatan hasil penelaahan usulan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Sekretariat DPRD mendukung prioritas tersebut yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, mendukung terselenggaranya peningkatan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan sebuah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai visi tertentu,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan yang ada, dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang lebih terukur.

Adapun tujuan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

“ MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DALAM RANGKA MEMFASILITASI KEGIATAN-KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA ”

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.

2.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2024 merupakan upaya-upaya dalam tema arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang ingin diwujudkan pada 2024 yaitu ***“Pemantapan kondusivitas wilayah untuk mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pertanian”***.

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2024 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ada 2 program, 15 Kegiatan dan 47 sub kegiatan, sebagai berikut :

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Capaian kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penang gung Jawab
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)	Lokasi	Sumber Dana	Target Kinerja	Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)	
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
4.02	Sekretariat DPRD									
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota									
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	16 dokumen	9.500	Kab. Banjarnegara	DAU	16 dokumen	10.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 Laporan	8.500	Kab. Banjarnegara	DAU	4 Laporan	9.000	Sekretariat DPRD

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	35 orang/ bulan	4.403.491	Kab. Banjarnegara	DAU	35 orang/ bulan	5.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	119.020	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	125.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 orang	25 orang	205.000	Kab. Banjarnegara	DAU	25 orang	220.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	30.000	Kab. Banjarnegara	DAU	1 paket	32.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 paket	18 paket	350.000	Kab. Banjarnegara	DAU	18 paket	365.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 dokumen	25.000	Kab. Banjarnegara	-	-	-	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	30 unit	165.000	Kab. Banjarnegara	DAU	30 unit	250.000	Sekretariat DPRD

4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	1 unit	100.000	Kab. Banjarnegara	-	-	-	-
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 dokumen	175.000.00	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	185.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 dokumen	365.000	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	380.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	2 unit	81.380	Kab. Banjarnegara	DAU	2 unit	85.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	22 unit	337.380	Kab. Banjarnegara	DAU	22 unit	350.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	50 unit	93.114	Kab. Banjarnegara	DAU	50 unit	95.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100.000	Kab. Banjarnegara	DAU	1 unit	200.000	Sekretariat DPRD

4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	28.763.370	Kab. Banjarnegara	DAU	50 orang	29.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	1 paket	537.811	Kab. Banjarnegara	DAU	1 paket	550.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	50 orang	47.196	Kab. Banjarnegara	DAU	50 orang	50.000	Sekretariat DPRD
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD									
04.02.02.2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD									
04.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	10 dokumen	2.128.357	Kab. Banjarnegara	DAU	10 dokumen	2.200.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	3 dokumen	3 dokumen	605.664.000	Kab. Banjarnegara	DAU	3 dokumen	630.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	5 dokumen	5 dokumen	932.001	Kab. Banjarnegara	DAU	5 dokumen	1.000.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran									
04.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	667.428	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	700.000	Sekretariat DPRD

04.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	689.317	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	700.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	667.337	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	700.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	690.954	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	720.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1 dokumen	7.126	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	7.500	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	999.634	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	1.100.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan									
04.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 dokumen	20 Laporan	79.850	Kab. Banjarnegara	DAU	20 Laporan	85.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20 Laporan	90.690	Kab. Banjarnegara	DAU	20 Laporan	95.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	20 Laporan	90.270	Kab. Banjarnegara	DAU	20 Laporan	90.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	20 Laporan	20 Laporan	97.290	Kab. Banjarnegara	DAU	20 Laporan	105.000	Sekretariat DPRD

		Perekonomian								
04.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 rekomendasi	1 rekomendasi	301.529	Kab. Banjarnegara	DAU	1 rekomendasi	320.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD									
02.2.04.02	Orientasi DPRD	Jumlah Dokument Hasil Penyelegaraan Orientasi DPRD	-	-	-	Kab. Banjarnegara	1 Dokumen	1 Dokumen	449.406	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 dokumen	5 dokumen	2.611.443	Kab. Banjarnegara	5 dokumen	5 dokumen	2.750.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 dokumen	5 dokumen	286.264	Kab. Banjarnegara	DAU	5 dokumen	300.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	1 orang	34.800.	Kab. Banjarnegara	DAU	1 orang	70.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 orang	240.200	Kab. Banjarnegara	DAU	8 orang	250.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 dokumen	7 dokumen	522.794	Kab. Banjarnegara	DAU	7 dokumen	550.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	449.693	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	465.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
04.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	672.611	Kab. Banjarnegara	DAU	1 dokumen	685.000	Sekretariat DPRD

04.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Laporan	2 dokumen	884.424	Kab. Banjarnegara	DAU	2 dokumen	1.200.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD									
04.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	646.784	Kab. Banjarnegara	DAU	2 Laporan	665.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD									
04.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	4 dokumen	3.217.597	Kab. Banjarnegara	DAU	4 dokumen	3.500.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	152.184	Kab. Banjarnegara	DAU	1 Laporan	160.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	12 dokumen	902.533	Kab. Banjarnegara	DAU	12 dokumen	920.000	Sekretariat DPRD
04.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	4 dokumen	384.050	Kab. Banjarnegara	DAU	4 dokumen	400.000	Sekretariat DPRD
	Jumlah				55.292.000				57.278.500	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluar program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjut :nya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing program/ kegiatan di Segagai berikut :

1. Program Penunjukan Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD.

Program penunjukan urusan pemerintahan daerah Sekretariat terdiri 2 Program, 8 Kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Dengan 18 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan logistik

kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

2. Program Dukung Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD.

Program dukung pelaksana tugas dan fungsi DPRD terdiri dari 8 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik, Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah, Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Kerja DPRD, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pelaksanaan Reses,

Pengawasan Kode Etik DPRD, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.

BAB V PENUTUP

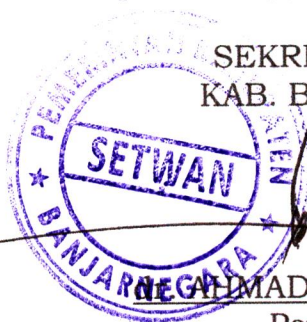
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KAB. BANJARNEGARA



ILHAM SETIAWAN, M.PH.

Pembina Tk I

NIP. 197209182005011008